

Dampak korupsi terhadap kemiskinan dan permasalahan social

Muh Akbar Saputra

Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: saputramuhammadakbar435@gmail.com

Kata Kunci:

korupsi;
kemiskinan;
permasalahan sosial

Keywords:

corruption;
poverty;
social problems

ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi topik perdebatan yang luas di berbagai negara di dunia. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), Jumlah orang miskin di negara-negara industri terus meningkat. Tentu saja, kemiskinan tidak hanya terjadi di negara maju tetapi juga di negara berkembang. Bank Dunia menyatakan, negara-negara berkembang menyumbang 40% dari tingkat kemiskinan dunia. Faktanya, kemiskinan kini tidak hanya menimpa mereka yang tidak bekerja, namun juga mereka yang bekerja dan mereka yang digambarkan

sebagai pekerja rentan. Pada tahun 2017, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menemukan bahwa negara-negara berkembang penuh dengan pekerja yang rentan, dengan lebih dari 300 juta orang berpenghasilan kurang dari \$1,90 per hari. Dalam penelitian ini, data panel digunakan untuk memeriksa hubungan antara korupsi dan kemiskinan. H. Perpaduan data deret waktu dan cross-sectional Wanner dan Pevalin dalam Sembodo (2013) menyatakan bahwa regresi data panel adalah metode untuk memodelkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam data panel negara Asia Tenggara. Data panel cenderung stabil setiap tahun. Malaysia berada di posisi kedua dengan CPI 47 pada tahun 2018, namun nilai tersebut cenderung menurun dibandingkan tiga tahun terakhir, ketika CPI Malaysia berada di angka 50 pada tahun 2015. Indonesia menempati peringkat ketiga Pada 2018, berada di posisi ketiga di Asia Tenggara dengan skor CPI 38. Korupsi di negara-negara Asia Tenggara cenderung stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun 2015 hingga 2018.

ABSTRACT

Poverty is still a widely debated topic in various countries in the world. According to the International Labor Organization (ILO), poverty in industrialized countries continues to increase. Of course, poverty does not only occur in developed countries but also in developing countries. According to the World Bank, developing countries account for 40% of the world's poverty rate. In fact, poverty now not only affects those who do not work, but also those who work and those who are described as vulnerable workers. In 2017, the International Labor Organization (ILO) found that developing countries are full of vulnerable workers, with more than 300 million people earning less than \$1.90 per day. Information analysis used in this research to examine the relationship between corruption and poverty uses an information board. H. Combination of time series information and cross-sectional information. Wanner and Pevalin in Sembodo (2013) argue that information board regression is a set of techniques for modeling the influence of independent variables on dependent variables in information boards for Southeast Asian countries, and information boards tend to be stable from year to year. In second place is Malaysia with a CPI score of 47 in 2018, but this value tends to decrease compared to the last three years, when Malaysia's CPI was at 50 in 2015. Indonesia is in third place in Southeast Asia with a CPI score of 38 in 2018. Corruption in Southeast Asian countries tends to be stable and did not experience significant changes from 2015 to 2018.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Korupsi memiliki banyak efek negatif, termasuk kemiskinan dan masalah sosial. Berikut adalah beberapa contoh dampak korupsi terhadap kemiskinan dan masalah sosial Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik. Dan Korupsi dapat menyebabkan harga jasa dan pelayanan publik menjadi mahal, menyebabkan masyarakat kurang memiliki akses ke fasilitas publik yang seharusnya dapat diakses secara umum. Terbatasnya Akses Bagi Masyarakat Miskin Korupsi dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan karena dana yang seharusnya dipake untuk kepentingan bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan. Akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi koruptor.

Korupsi dapat menyebabkan pengelolaan dana yang tidak transparan, sehingga masyarakat tidak tahu bagaimana dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum digunakan. Kualitas pelayanan publik dapat menurun karena koruptor sering menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk kepentingan pribadi mereka. Dalam beberapa situasi, korupsi juga dapat menyebabkan kelangkaan dana untuk pendidikan, menyebabkan anak-anak yang kurang mampu tidak dapat menempuh pendidikan yang seharusnya mereka miliki. Karena dampak korupsi terhadap kemiskinan dan masalah sosial sangat luas dan kompleks, perlu diatasi dengan cara yang efisien dan jelas.

Kemiskinan masih menjadi topik perdebatan yang luas di berbagai negara di dunia. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), Jumlah orang miskin di Negara industri terus meningkat. Kemiskinan jelas terjadi di kedua negara maju dan berkembang. Bank Dunia menyatakan, negara-negara berkembang menyumbang 40% tingkat kemiskinan dunia. Faktanya, kemiskinan kini tidak hanya menimpa mereka yang tidak bekerja, namun juga mereka yang bekerja dan mereka yang digambarkan sebagai pekerja rentan. Pada tahun 2017, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menemukan bahwa negara-negara berkembang penuh dengan pekerja yang rentan, dengan lebih dari 300 juta orang berpenghasilan kurang dari \$1,90 setiap hari, menurut *Statistics Center*. lembaga yang menyediakan informasi statistik untuk Indonesia, menggunakan konsep pendekatan kebutuhan dasar untuk mendefinisikan kemiskinan. Konsep ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non makanan. Oleh karena itu, penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita bulannya berada di bawah garis kemiskinan.

Menurut Suparlan 1993 Korupsi, di sisi lain, sudah lama ada di masyarakat. Penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan ini telah banyak terdengar di media. Bahasa *Corrupture* berasal dari kata "korupsi", yang berarti buruk, rusak, menggoyahkan, dan menyogok. Korupsi adalah ketika para pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menguntungkan diri sendiri secara melanggar hukum. Tidak diragukan lagi, korupsi berdampak negatif pada negara; contohnya, korupsi di Afrika Selatan menyebabkan kerugian sebesar \$ 46 miliar pada tahun 2015. Selain itu, korupsi menyebabkan kehancuran moral bangsa, kehancuran standar kerja masyarakat, eksploitasi sumber daya alam, dan merosotnya sumber daya manusia.

Negara di seluruh dunia telah berusaha untuk mengakhiri kemiskinan, tetapi upaya ini terhambat oleh tingkat korupsi yang tinggi. Selain itu, sejumlah penelitian telah dilakukan, salah satunya adalah (Panji & Utomo, n.d.) menyatakan bahwa ada hubungan antara kemiskinan dan korupsi. Faktor ekonomi dan pemerintahan akan dipengaruhi oleh korupsi, yang akan berdampak pada tingkat kemiskinan kemudian. Oleh karena itu, temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai seberapa besar hubungan antara tingkat korupsi dan kemiskinan dalam suatu negara.

Mayoritas Tingkat kemiskinan di Asia Tenggara masih tinggi karena mereka masih merupakan negara berkembang. Bruno Jetin menyatakan dalam buletin tentang kemiskinan di ASEAN bahwa kemiskinan absolut masih merupakan masalah sosial yang signifikan di Laos dan Filipina. di Indonesia dan Myanmar. Oleh karena itu, ASEAN membentuk sebuah komunitas yang berfokus pada peningkatan integrasi ekonomi di wilayah tersebut, dengan nama ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint menetapkan tujuan untuk "Menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tepat dan inklusif di ASEAN untuk mengurangi kesenjangan pembangunan, mengeliminasi apabila tidak mengurangi kemiskinan" pada tahun 2025. secara signifikan, mempertahankan peningkatan kelas menengah dan peningkatan pendapatan per kapita. Namun, AED tidak akan berhasil jika korupsi terus terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Oleh Study of Straightforwardness Universal Debasement Discernment Record (CPI) 2019, semua negara ASEAN, kecuali Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, menerima skor di bawah 50 dari 100. Studi ini menunjukkan bahwa skor CPI yang lebih rendah menunjukkan tingkat korupsi yang lebih tinggi di negara tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi cara kemiskinan dan korupsi berkembang di negara-negara Asia Tenggara, menemukan contoh regresi papan informasi yang sesuai, dan menentukan bagaimana keduanya berhubungan satu sama lain.

Pembahasan

Definisi Korupsi

Aristoteles menggunakan istilah "korupsi" dalam bukunya tentang generasi untuk menggambarkan korupsi, yang berarti perubahan atau kemerosotan, dan tidak terkait dengan kata "kekuasaan" atau uang. Namun, pada tahun 1887, Ruler Acton menghubungkan kata "korupsi" dengan kekuasaan, mengatakan bahwa "kekuasaan tidak merusak apa quip dan kekuasaan absolut korup sepenuhnya." Sejak saat itu, korupsi selalu dikaitkan dengan kekuasaan dan tindakan yang merugikan masyarakat atau kepentingan umum untuk keuntungan kelompok.
Teks utama dalam textual style 12, spasi tunggal. Spasi setiap akhir paragraf 6 poin. Setiap awal section menggunakan to begin with line. Teks utama dalam text style 12, spasi tunggal. Spasi setiap akhir paragraf 6 poin. Setiap awal passage menggunakan to begin with line. Menurut Bank Dunia pada tahun 2016 menyatakan bahwa korupsi adalah setiap transaksi antara aktor sektor publik dan swasta melalui layanan publik umum yang secara ilegal diubah menjadi keuntungan pribadi (Hariyani et al., 2016). Menurut Transparansi Internasional, korupsi besar-besaran mencakup tindakan pemerintah

yang mendistorsi kebijakan atau fungsi utama negara sehingga mereka dapat mengambil keuntungan dan merugikan masyarakat.

Korupsi dapat didefinisikan dalam hukum yang berbasis norma. Dalam kasus di beberapa perusahaan, kedua definisi mungkin sama dengan (kebetulan). Secara hukum, korupsi adalah tindakan mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan orang lain yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, yang merupakan pelanggaran langsung terhadap batasan hukum dari aksi tersebut. Oleh karena itu, individu yang korup di mata hukum hanya dapat dianggap telah bertindak sempurna dalam kerangka norma. Di sisi lain, manusia mungkin dianggap korup menurut standar standar, tetapi dapat dianggap murni oleh hukum. Kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa korupsi adalah penggunaan kekuasaan dan kekuasaan pemerintah untuk kepentingan pribadi (Firman Baktiar et al., 2020).

Akibat masif korupsi

Korupsi dapat datang dalam berbagai bentuk dan memengaruhi ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Hasil penelitian berbeda menunjukkan bahwa ada dampak negatif. Etika dan moralitas profesi, lingkungan politik dan ekonomi, adat istiadat, adat istiadat, tradisi, dan demografi adalah beberapa penyebab umum korupsi. Korupsi dapat menghambat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Selain itu, korupsi mengurangi pendapatan pajak dan mengurangi efisiensi program bantuan keuangan. Secara keseluruhan, tingkat korupsi yang tinggi di masyarakat mengurangi kepercayaan terhadap hukum, supremasi hukum, pendidikan, dan kualitas hidup, termasuk akses ke infrastruktur layanan kesehatan.

Menurut Haryanto, 2019 Karena kehilangan uang pajak dan penurunan kualitas pelayanan publik, masyarakat menjadi korban utama korupsi pemerintah. Korupsi juga memiliki efek jangka panjang, seperti ketidakefektifan pemerintahan, penurunan demokrasi, penurunan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan jumlah orang tunawisma. meningkat dan etika negara semakin memburuk. Dampak korupsi yang dirangkum oleh (Panji & Utomo, t.t.) meliputi (1) Menurut Transparansi Internasional, ada korelasi yang kuat antara tingkat korupsi dan tingkat kemiskinan di masyarakat. Mereka menyatakan bahwa korupsi berdampak pada perekonomian melalui beberapa konsekuensi, termasuk perlambatan pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, penurunan harga barang dan jasa publik, penurunan penerimaan pajak negara, dan peningkatan utang pemerintah negara. Secara logis, jumlah tindak pidana meningkat seiring dengan jumlah kasus korupsi.

Di sisi lain, Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum meningkat ketika korupsi dikurangi, sehingga penurunan korupsi dapat secara tidak langsung mengurangi kejahatan di masyarakat. Beberapa dampak sosial dari korupsi adalah (a) mahalnya pelayanan publik dan pelayanan, (b) kemajuan yang lambat dalam pengentasan kemiskinan, (c) terbatasnya akses bagi orang miskin, (d) meningkatnya kejahatan, dan (e) solidaritas yang semakin jarang saat ini. (3) Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan, khususnya (a) hilangnya etika sosial politik. Korupsi

bukan tindak pidana biasa karena merusak Unsur-unsur paling mendasar pemerintahan. moral politik. bagian dari kehidupan.

Pemberantasan Pidana Korupsi

Untuk menghentikan tindak pidana korupsi, banyak upaya telah dilakukan. Salah satunya, menurut (Suparman dkk., t.t.), adalah strategi pencegahan. Strategi ini harus dibuat dan diterapkan dengan mengarahkan faktor-faktor yang mendorong korupsi. Untuk setiap alasan yang ditunjukkan, harus dilakukan tindakan pencegahan untuk meminimalkan penyebab korupsi. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan peluang terjadinya korupsi dan upaya tersebut harus melibatkan banyak aktor dalam pelaksanaannya agar berhasil dan mencegah korupsi. (2) Strategi deduktif, yang harus diciptakan dan dikerahkan secara khusus ke arah sehingga apabila telah terjadi tindak pidana korupsi maka tindakan akan diketahui dengan cepat dan tepat. mungkin, secara berurutan untuk dapat mematuhi dengan tepat. Dengan mengingat hal ini, perlu memperbaiki banyak sistem, agar sistem ini dapat beroperasi sesuai dengan peraturan dengan cukup tepat untuk memberikan kredit Hubungi jika terjadi korupsi. Hal ini sebenarnya memerlukan adanya berbagai disiplin ilmu, baik hukum, ekonomi, maupun ilmu politik dan sosial. (3) Strategi Penegakan, yang harus dibuat dan dilaksanakan secara khusus dengan manajemen untuk memberikan sanksi hukum yang sesuai dengan cepat dan tepat bagi pihak-pihak terkait. dalam korupsi. Dengan logika ini maka proses penanganan tindak pidana korupsi mulai dari tahap penyidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan perlu ditinjau kembali agar dapat disempurnakan dalam segala aspeknya, agar proses penanganannya dapat efektif dilakukan dengan cepat dan akurat. Namun pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu.

Tahun 2020 melibatkan mengidentifikasi 4.444 bencana non-alam terkait penyebaran Covid-19 sebagai 4.444 bencana nasional. Covid-19 telah menimbulkan 4.444 guncangan luar biasa pada 4.444 struktur ekonomi dan sosial pemerintah, 4.444 pada sektor swasta dan sosial. Pemerintah, pihak swasta, kelompok masyarakat dan individu telah mengambil tindakan dan inisiatif sesuai dengan kemampuan mereka untuk melawan bencana ini. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Undang-Undang Pengganti Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 Terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Pendanaan untuk Penanganan Crown Infection Malady 2019 (Covid-19) Pandemi dan/atau dalam Rangka penanggulangannya Ancaman yang membahayakan Perekonomian dan/atau stabilitas nasional Sistem keuangan. Persoalan muncul ketika Perppu tersebut di atas dinilai lemah nafas pemberantasan korupsi karena memberikan kekebalan kepada para pihak dalam Perppu tersebut (anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK dan PNS atau pegawai). Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Badan Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan dan PNS lainnya) dan tentunya rentan terhadap korupsi politik.

Kesimpulan dan Saran

Karena tidak ada perubahan yang signifikan, korupsi di negara-negara Asia Tenggara dari tahun 2015 hingga 2018 tampaknya tetap sama. Sepertinya kemiskinan yang

ditunjukkan oleh data IPM di negara-negara Asia Tenggara dari tahun 2015 hingga 2018 meningkat. Untuk memodelkan pengaruh korupsi terhadap kemiskinan di Asia Tenggara, model regresi papan data lebih cocok. negara sebagai settled impact demonstrate dengan efek person Dari gambar demonstrate kita dapat melihat bahwa korupsi dinyatakan dalam CPI dan kemiskinan yang dinyatakan oleh IPM berbanding lurus satu sama lain, artinya setiap kenaikan IHK sebesar satu satuan sebesar akan berdampak terhadap peningkatan IPM sebesar 0,001443 satuan. Dari diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya peluang atau kekurangan pengawasan adalah faktor utama yang menyebabkan korupsi pada oknum. lemahnya sistem, dan lain-lain) dan keinginan atau niat (dipengaruhi oleh kebutuhan atau keserakahan, disertai dengan keinginan atau niat)

Jika ada peluang atau opportunity Akan terjadi tindak pidana korupsi, seperti yang terjadi saat tahun lalu selama pandemi COVID-19. Korupsi memiliki berbagai bentuk dan efek. Ada dua dimensi korupsi, yaitu ekonomi dan sosial. Kedua aspek ini terkait dengan kepentingan umum, seperti kontrol warga. Ketika korupsi terjadi, itu berdampak pada peningkatan nilai investasi. Selain itu, korupsi juga berdampak pada aspek sosial. Korupsi menyebabkan pemerintah tidak dapat melakukan investasi publik yang baik, yang mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggi dan beban bagi para pelaku ekonomi. Akibatnya, biaya pelayanan publik seperti tingginya biaya pendaftaran. Hasil diskusi di atas menunjukkan bahwa dua elemen utama yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi adalah kesempatan atau peluang (misalnya, kekurangan pengawasan, sistem yang lemah, dan lainnya) dan niat atau keinginan (didorong oleh kebutuhan atau keserakahan). Dengan munculnya peluang atau peluang seperti saat ini di masa pandemi Covid-19, tindak pidana korupsi pun terjadi. Korupsi memiliki banyak efek dan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Ketika dilihat dari sudut pandang ekonomi dan sosial, dampak korupsi dapat dinilai dari sudut pandang masyarakat sebagai pemegang kekuasaan. Dalam hal ekonomi, korupsi menyebabkan peningkatan nilai investasi. Selain efek ekonomi, korupsi memiliki efek sosial. terjadi korupsi, yang menyebabkan pemerintah tidak dapat melakukan investasi publik yang baik, yang mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggi, yang menghambat bisnis.

Daftar Pustaka

- Firman Baktiar, A., Fadhilah, H., Dwiyantri Simatupang, M., & Rani Nooraeni, dan. (2020). Pengaruh tindak korupsi terhadap kemiskinan di Negara-Negara Asia Tenggara dengan model panel data . Dalam *Indonesian Journal of Statistics and Its Applications* (Vol. 4, Nomor 2).
- Hariyani, H. F., Savio Priyarsono, D., & Asmara, A. (2016). Analisis Faktor-faktor yang memengaruhi korupsi di kawasan Asia Pasifik (Analysis of Factors that affecting Corruption in Asia-Pacific Region) (Vol. 5, Nomor 2).
- Haryanto, L. P. (2019). Akuntabilitas dan tingkat korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Dalam *Jurnal Akuntansi Aktual* (Vol. 6, Nomor 2).
- Panji, I., & Utomo, D. C. (t.t.). Pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap tingkat korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia: Studi empiris pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2020. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 12(2), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

- Suparman, N., Tri Sakti, F., Saeful Anwar, H., & Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, J. (t.t.). Sosial Ekonomi di Indonesia. <https://Threechannel.Co/Category/Aspirasi-Warga/>.
- Maulana, Z. (2016). Persepsi masyarakat terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Aceh Utara. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Unsam*, 5(2), 573–581.
- Yanti, H. B. (2021). Faktor determinan pemicu korupsi di Sektor Pemerintahan: Studi pada Pegawai Negeri Sipil di Jakarta. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 104–117. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.27>